

Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup

Ervalda Herjulyhand¹, Titi Darmi²

¹²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹ervaldaherjulyhand@gmail.com

²titi.darmi@gmail.com

Abstract

The aim of this research is what the policies and waste management are in the Bengkulu City Environmental Service. The research method used is qualitative, the data source consists of primary and secondary data. The analysis used by researchers goes through stages, data collection, data presentation, and validation of the figures who play a role. From the research results, waste management is carried out in accordance with regional regulation Number 02 of 2011 concerning waste management. Waste management has been carried out in accordance with the policies and procedures stipulated in the existing policy, the result is that the policy has been carried out according to the target to be achieved but because The lack of infrastructure results in slow waste transportation and waste handling. The conclusion of this research is that due to the lack of infrastructure, waste management has not been properly integrated, this problem is quite complex so it has not had a big impact on environmental cleanliness.

Keywords: Policy; Environment; Waste Management;

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan serta pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. analisis yang digunakan peneliti melalui tahap, pengumpulan data, penyajian data, dan validasi terhadap tokoh yang berperan. dari hasil penelitian, pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan peraturan daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. pengelolaan sampah tersebut telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan pada kebijakan yang ada, hasilnya kebijakan tersebut telah dijalankan sesuai target yang ingin di capai tetapi dikarenakan kurangnya sarana prasarana berakibat pada lambatnya pengangkutan sampah dan penanganan sampah, simpulan penelitian ini bahwa karena kurangnya sarana prasarana sehingga menyebabkan pengelolaan sampah belum terintegrasi dengan baik, permasalahan tersebut cukup kompleks sehingga belum memberikan dampak yang besar bagi kebersihan lingkungan.

Kata Kunci: Kebijakan; Lingkungan; Pengelolaan Sampah;

Cite this article format:

herjulyhand, E., Darmi, T. (2024). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 214-218.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dialami diseluruh dunia tak terkecuali di Indonesia yang hingga saat ini sampah masih saja menjadi masalah yang belum teruraikan. Sampah merupakan konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus berjalan. Menurut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah yang terhitung (KemenLHK, 2020).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menekankan agar pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat agar dikelola oleh LPM yang ada di setiap kelurahan. Mengingat peran penanganan sampah ini harus melibatkan masyarakat langsung, warga juga harus membayar iuran setiap bulannya kepada LPM. Penekanan ini dilakukan agar permasalahan sampah bisa diselesaikan dengan serius. Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, menekankan masalah sampah bukanlah masalah pemerintah saja, perlu partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai pihak dalam mengatasinya, mulai dari permasalahan di hulu hingga hilir. Karena mengatasi masalah sampah tak semudah membalikkan telapak tangan, butuh komitmen dan sinergi agar semua yang dicanangkan berjalan sebagaimana mestinya. (Liza,2022).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. (Bengkulu Ekspres,2022).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas yang berhubungan langsung dengan pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan langkah untuk menemukan

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pengelolaan sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya peraturan yang cukup diharapkan pengelolaan persampahan dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar menimbulkan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan demikian aspek peraturan perundang-undangan akan menjadi sangat penting sebagai landasan untuk menyelenggarakan operasional kebersihan. Kondisi yang ada saat ini adalah :

1. UU No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengolahan Sampah.
4. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bengkulu.
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah

Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada)

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu II - 17 penghambat, sedangkan untuk nilai rasio C/N yang rendah akan meningkatkan emisi dari nitrogen sebagai Teknis Teknologis.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup harus bisa lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang dianggap kurang dalam pelayanan pengangkutan sampah jadi mungkin bisa lebih ditegaskan lagi para petugasnya untuk bisa lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan pengangkutan sampah seperti yang kata nya diangkat setiap hari tetapi ternyata ada beberapa rumah yang sampahnya tidak diambil oleh petugas sampah
2. Bisa lebih melakukan alternatif lain untuk menanggapi masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam menjaga lingkungan ,bisa juga memberikan teguran dan mengadakan sosialisasi guna sebagai media atau himbuan kepada masyarakat tentang sampah

3. Pemerintah perlu tegas terhadap regulasi yang telah dibuat serta inovatif dalam mencari bentuk pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan komprehensif.

Peneliti menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengadopsi paradigma baru dalam pengolahan sampah perkotaan dengan menyediakan sarana dan prasaan yang memadai, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mau mengelola sampah rumah tangga dengan metode 3R dengan demikian diharapkan volume sampah dapat dikurangi dan lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat.

REFERENSI

- Riset: 24 Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola. (2018, April 2018). News.
administrator. (2007, Oktober 2007). Ahli Sampah Indonesia: Professor Enri Damanhuri. News.
Administrator. (2021, Februari 2021). Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional. News.
administrator. (2023, Januari 2023). Bimtek Pengisian Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). News.
Anugrah, N. (2020, Februari 2020). KLHK: Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah. News.
Asti Mulansari, S., Hru Husodo, A., & Muhadjir, N. (2014, mei kamis). Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik. Kesehatan Masyarakat Nasional, 8, 404-410.
Darmi, T., & Meta Aryanti. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Pantai. Administration Silampari, 4, 17-23.
Ermayendri, D., Satria Putra Utama, R., Ramdhon, M., & Indarwanto. (2022, April jumat). Cost Benefit Anaylisis Dalam Peningkatan Metode Lanfiling Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Studi Kasus : Tpa Air Sebakul Kota Bengkulu. Journal of Nursing, 10, 24-32.
Ismah. (2022, Desember 2022). Alat Berat Mengalami Kerusakan, DLH Kota Bengkulu Ajukan Tambahan Alat Berat Untuk TPA Air Sebakul. News.
Lia Puspa Sari, Ju'im Thaap, & Titi Darmi. (2021). Analisi Kebijakan Pengelolaan Ssampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Administration, 2, 45-55.
Paidi, W., & Aap . (2023, Januari minggu). Tumpukan Sampah Menggunung Hiasi Kota Bengkulu, Begini Penjelasannya. januari 2023, p. 1.
Paulus Iphon Jantua Tumanggor, R. S. (2019). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal. Administrasi Publik, 8, 1-26.
Rahman, A., & Paidi, W. (2022, Agustus 2022). Woww... Volume Sampah di Kota Bengkulu Capai 400 Ton Setiap Hari. News.
Rizaty, M. A. (2021, Juli 2021). Mayoritas Sampah Nasional dari Aktivitas Rumah Tangga pada 2020. News.

Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Triadiniata, F., & Azhar, R. (2022, September 2022). Pemkot Bengkulu Tekankan LPM Aktif Kelola Sampah Masyarakat. News.